

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Accept International merupakan *International Non-Governmental Organization* yang menjadi salah satu aktor non-negara yang terlibat langsung dalam upaya deradikalisasi di Indonesia melalui pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keterlibatan organisasi ini menunjukkan bahwa penanganan ekstremisme tidak lagi didominasi oleh negara, tetapi melibatkan aktor lintas *level* yang membawa pendekatan berbeda. Keberadaan Accept International menjadi relevan karena strategi deradikalisasi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau dimensi sosial dan psikologis individu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keamanan belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas radikalisme. Kondisi tersebut membuka ruang bagi aktor internasional untuk masuk dan berperan dalam struktur deradikalisasi di Indonesia.

Terorisme tetap menjadi ancaman yang melatarbelakangi munculnya kebutuhan terhadap pendekatan alternatif tersebut. Djumantara et al. (2021) mencatat 751 peristiwa pengeboman sepanjang 1977–2018 yang menunjukkan pola kekerasan yang berulang. Rangkaian peristiwa seperti Bom Bali 2002, serangan JW Marriott 2003, hingga Bom Thamrin 2016 menunjukkan bahwa kelompok ekstremis terus beradaptasi (Pradana & Pamesti, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan reaktif

berbasis keamanan belum mampu merespons dinamika ancaman secara efektif. Situasi ini menjadi dasar mengapa pendekatan deradikalisasi berbasis rehabilitasi mulai dikembangkan.

Secara khusus, Accept International berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi individu yang terpapar paham radikal dan ekstremisme kekerasan melalui pendekatan sosial dan psikologis. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menekankan penindakan, organisasi ini mengembangkan strategi seperti pendampingan individu, penguatan relasi sosial, serta dukungan dalam proses kembali ke masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Accept International tidak hanya melengkapi peran negara, tetapi juga menghadirkan alternatif strategi yang lebih berorientasi pada perubahan individu secara menyeluruh.

Selain itu, praktik deradikalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Program yang ada cenderung berfokus pada aspek keamanan sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi sosial dan psikologis individu. Namun pada faktanya, radikalisme merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, kondisi sosial, dan ekonomi (Rusyidi et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat represif belum cukup sepenuhnya untuk mengatasi permasalahan dari akar rumput. Rasa takut yang meningkat berdampak pada menurunnya partisipasi sosial dan kepercayaan terhadap negara. Ketika kepercayaan melemah, efektivitas kebijakan penanggulangan ikut terdampak. Oleh karena itu, intervensi pada dimensi

sosial dan psikologis menjadi bagian penting dalam strategi deradikalisasi. Kebutuhan ini mendorong munculnya pendekatan yang lebih komprehensif.

Kompleksitas faktor juga menunjukkan bahwa penindakan tidak cukup untuk memutus siklus ekstremisme. Program deradikalisasi hadir untuk mengubah pola pikir dan kondisi sosial individu. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala terutama pada keberlanjutan dan risiko *residivism*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan.

Kesenjangan tersebut membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara yang mampu menjangkau dimensi sosial secara lebih fleksibel. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat mulai terlibat melalui pendekatan berbasis komunitas (Supriadi et al., 2020). Pendekatan *Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE)* menekankan pentingnya intervensi di tingkat masyarakat (Azhari et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa deradikalisasi membutuhkan keterlibatan multi-aktor.

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus membahas strategi Accept International masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pemahaman mengenai efektivitas pendekatan yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam deradikalisasi menjadi belum cukup optimal. Walaupun demikian, di tengah kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif, strategi yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti Accept International penting untuk dipahami, baik untuk melengkapi maupun memperkuat kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, Accept International menempati

posisi sebagai aktor non-negara internasional yang membawa pendekatan berbasis pengalaman global. Organisasi ini tidak hanya beroperasi sebagai pelengkap, tetapi mengisi celah dalam strategi deradikalisasi melalui rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penanganan ekstremisme telah bergeser dari pendekatan negara semata menuju kolaborasi lintas level. Pola ini mencerminkan praktik *Multi-Level Governance* yang menghubungkan aktor internasional, nasional, dan lokal. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana strategi Accept International beroperasi dalam struktur tersebut serta bagaimana kontribusinya dalam deradikalisasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama terkait bagaimana strategi yang digunakan oleh Accept International dalam upaya deradikalisasi di Indonesia, khususnya dalam merespons keterbatasan pendekatan negara serta menjangkau dimensi sosial yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan formal.

“Bagaimana strategi *Accept International* dalam upaya program deradikalisasi di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan dan menganalisis secara mendalam strategi serta efektivitas program yang diterapkan oleh Accept International sebagai organisasi non-pemerintah internasional dalam upaya deradikalisasi di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana kerja sama lintas aktor, baik antara pemerintah maupun organisasi non-negara, dapat menciptakan strategi deradikalisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai kemanusiaan universal.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan peran Accept International dalam menjalankan upaya deradikalisasi kelompok ekstremis di Indonesia, serta memahami bagaimana bentuk kolaborasi *multilevel* antaraktor mulai dari pemerintah pusat, lembaga internasional, hingga masyarakat lokal dapat membangun tata kelola bersama dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara solidaritas kemanusiaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kerja sama lintas level dalam konteks upaya penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk strategi dan intervensi yang diterapkan oleh Accept International dalam program deradikalisasi di Indonesia, termasuk

pendekatan psikososial, ekonomi, dan sosial kemanusiaan yang menekankan prinsip solidaritas lintas batas. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global diterjemahkan dalam praktik kerja sama antara Accept International dan mitra lokal di Indonesia, serta bagaimana mekanisme koordinasi dan pembagian peran lintas tingkatan antaraktor mulai dari lembaga negara, organisasi internasional, hingga komunitas akar rumput berperan dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program deradikalisasi. Melalui pemahaman ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk kolaborasi *multilevel* yang berorientasi pada kemanusiaan dan perdamaian universal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hubungan internasional serta manfaat praktis bagi perumusan kebijakan publik, khususnya dalam konteks kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Pendekatan kolaboratif berbasis nilai kemanusiaan dan solidaritas global memperkaya pemahaman tentang bagaimana kerja sama lintas aktor dapat mendukung keberlanjutan program deradikalisasi di Indonesia.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam studi hubungan internasional,

khususnya pada bidang keamanan non-tradisional dan peran aktor non-negara. Penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan universal, tanggung jawab global, serta keadilan lintas batas dapat menjadi dasar normatif bagi kerja sama internasional dalam isu deradikalisasi. Selain itu, penelitian ini mengkaji mekanisme kolaborasi antara negara, organisasi internasional, dan komunitas lokal dalam menciptakan efektivitas program yang adaptif dan partisipatif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris melalui studi kasus Accept International di Indonesia, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan tentang peran organisasi internasional dalam penanganan ekstremisme berbasis kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi deradikalisasi yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Hasil penelitian dapat membantu Lembaga pemerintah nasional sekaligus lokal, serta Lembaga Swadaya Masyarakat memahami pentingnya sinergi lintas aktor yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga memperkuat aspek kemanusiaan, reintegrasi sosial, dan kepercayaan publik.

Bagi Accept International dan organisasi internasional sejenis, penelitian ini menjadi dasar dalam mengembangkan model kerja sama yang adaptif terhadap konteks lokal namun tetap berpijak pada nilai-nilai

kemanusiaan global dan kolaborasi partisipasi. Selain itu, bagi kalangan akademik dan lembaga pendidikan, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kurikulum, riset kebijakan, serta program edukasi perdamaian yang menekankan nilai kemanusiaan dan kerja sama *multilevel* lintas aktor.

1.5 Literature Review

Penelitian terdahulu tentang peran radikalisme dikelompokkan menjadi dua bagian. Kelompok pertama berasal dari aktor negara, seperti yang dijelaskan dalam studi "Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Mengatasi Radikalisme di Indonesia" oleh Hasan Sazali (2022). Studi ini menekankan pentingnya Rencana Strategis Nasional yang terkoordinasi untuk menangani radikalisme secara efektif dan mempromosikan harmoni dalam kehidupan beragama dan bernegara melalui komunikasi antar-agama, peran media sosial, pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam melawan ekstremisme. Komunikasi yang efektif, menurut Sazali, dapat mendorong pemahaman dan kerja sama dalam komunitas yang beragam, serta mencegah radikalisme melalui pendekatan komprehensif dengan partisipasi publik dan pemanfaatan kearifan lokal untuk membangun modal sosial serta ketahanan terhadap ideologi radikal.

Penelitian berjudul "Manajemen Konflik Sosial dalam Kepolisian Nasional Indonesia (INP)" oleh Sutrisno dan Syafrudin (2024) menyoroti peran kepolisian, khususnya melalui program Bhabinkamtibmas, dalam

mencegah radikalisme dan mempromosikan moderasi agama. Studi ini menunjukkan bahwa efektivitas petugas sering terhambat oleh kurangnya pelatihan formal dalam teknik resolusi konflik. Kasus di Tangerang Selatan mengilustrasikan pentingnya pelatihan dan sertifikasi mediator konflik oleh LSP Polri untuk meningkatkan kemampuan mediasi penal dan keadilan restorasi. Selain itu, penelitian oleh Putra (2024) juga menekankan pentingnya kolaborasi kepolisian dengan pemimpin agama, organisasi seperti MUI, dan komunitas lokal seperti Sawala untuk menyebarkan nilai toleransi melalui dialog antar agama dan pendekatan budaya.

Selanjutnya, muncul penelitian oleh Reni Windani (2017) menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peran lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk melawan terorisme. BNPT telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk melibatkan generasi muda dan meningkatkan literasi media untuk mengatasi tantangan terorisme. Namun, studi ini menyoroti masalah yang terus ada, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kebutuhan untuk deteksi dini terhadap ancaman terorisme. Pemberantasan terorisme yang efektif memerlukan pendekatan *multi-faceted* yang mencakup deradikalisasi untuk kelompok militan inti dan kontra-radikalisasi terhadap simpatisan serta masyarakat umum. Diperkuat dengan Irawan & Priyanto (2024) tentang perlunya pendekatan kombinasi antara pendekatan keras dan lunak untuk melawan radikalisme. Studi ini juga menyoroti upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia,

khususnya Densus 88 AT, menggunakan pendekatan humanistik termasuk dialog dan keterlibatan keluarga untuk mencegah penyebaran ideologi radikal.

Beralih pada kelompok kedua yang berdasar dari berbagai penelitian tentang keterlibatan aktor non-negara. Penelitian pertama berjudul “Pendekatan Humanis dalam Program Deradikalisasi di Indonesia” oleh Priyanto (2020) menekankan bahwa interaksi yang ramah dan humanis terhadap mantan narapidana terorisme dapat membangun hubungan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan antara mereka dengan masyarakat. Studi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dan komprehensif dalam deradikalisasi, yang melibatkan aktor negara dan non-negara, serta menasar tidak hanya mantan pelaku, tetapi juga keluarga dan jaringan yang berpotensi terpapar radikalisme. Diperkuat oleh Idris (2017) yang menyoroti bahwa pendekatan humanis dan akulturatif diperlukan untuk mencapai pemahaman bersama dan mencegah radikalisme yang sering menggunakan bahasa dan simbol agama untuk menarik simpati masyarakat awam. Selain itu, Romadlan (2022) mencatat bahwa kolaborasi antara aktor non-negara dan pemerintah dalam model tata kelola kolaboratif sangat penting untuk mencapai tujuan deradikalisasi yang lebih efektif.

Lebih lanjut, penelitian oleh Rijal et al. (2022) menunjukkan bahwa sekitar 20% mantan narapidana terorisme masih terlibat dalam aksi kekerasan, meskipun mereka telah mengikuti program deradikalisasi. Temuan ini menyoroti lemahnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah

sebagai salah satu hambatan utama dalam efektivitas program tersebut. Meskipun terdapat kerja sama yang cukup baik dengan lembaga seperti Detasemen Khusus 88, masih ada kendala dalam menjalin kolaborasi resmi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk mencegah radikalisme di kalangan mahasiswa, pendidikan moderasi beragama berbasis nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan inklusivitas dinilai efektif dalam membentuk sikap yang anti kekerasan. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dinilai mampu memperkuat upaya deradikalisasi serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman (Priyanto, 2020; Romadlan, 2022).

Penelitian oleh Anindya (2018) menyoroti pentingnya peran pemerintah lokal dalam mendukung reintegrasi mantan narapidana teroris ke masyarakat. Pemerintah daerah dapat menjadi penghubung yang efektif untuk mencegah residivisme terorisme. Namun, studi ini juga mencatat bahwa organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah belum dilibatkan secara optimal dalam program deradikalisasi, meskipun memiliki potensi besar. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat menjadi langkah penting untuk memperkuat program moderasi dan deradikalisasi (Hasan Sazali, 2022; Zulfikar & Aminah, 2020).

Penelitian keempat, Fikriyati (2017) mengkaji program deradikalisasi di beberapa negara dan menyoroti pentingnya dialog teologis dalam prosesnya. Di Singapura, misalnya, program deradikalisasi melibatkan komunitas Muslim dalam dialog teologis dengan narapidana terorisme.

Pendekatan ini juga diterapkan di Timur Tengah, seperti di Yaman dan Arab Saudi, di mana dialog intelektual digunakan untuk meyakinkan para aktivis kekerasan bahwa pemahaman mereka keliru. Berdasarkan Moghadam (2006) dalam bukunya *The Roots of Terrorism* menjelaskan bahwa organisasi keagamaan sering kali mendapatkan legitimasi melalui aktivitas sosial yang mereka lakukan, seperti bantuan kemanusiaan dan pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam program deradikalisasi dengan melibatkan tokoh agama pada penyebaran narasi kontra-ekstremisme yang lebih efektif di tingkat komunitas. Selain itu, Moghadam juga menyoroti bagaimana kelompok ekstremis sering kali menggunakan pendekatan serupa, yakni dengan menawarkan bantuan sosial sebagai cara untuk menarik simpati masyarakat dan merekrut anggota baru.

Lebih lanjut, Rabasa et al. (2010) menekankan pentingnya program rehabilitasi bagi narapidana terorisme yang mencakup pembinaan kemandirian dan kepribadian. Tujuannya adalah membekali mereka dengan keterampilan dan keahlian yang dapat digunakan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ezzarqui (2017) menyoroti perlunya pendekatan dialogis dalam proses deradikalisasi untuk meluruskan pola pikir ekstrem, sehingga mereka dapat menerima keberagaman dan hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda.

Penelitian berikutnya, Subagyo (2021) meneliti implementasi model *pentahelix* dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia, yang melibatkan lima elemen utama, yaitu akademisi, bisnis, komunitas,

pemerintah, dan media. Studi ini menyoroti bahwa kegagalan program deradikalisasi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh minimnya keterlibatan aktor bisnis dan media, yang seharusnya berperan dalam mendukung mantan narapidana terorisme melalui bantuan modal usaha dan narasi kontra-radikalisme di media massa serta media sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanpa sinergi dari kelima pihak tersebut, program deradikalisasi akan terus mengalami hambatan, terutama dalam aspek reintegrasi sosial dan ekonomi bagi mantan ekstremis. Dengan demikian, kolaborasi *multi-stakeholder* menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program deradikalisasi dan mencegah kembalinya mantan ekstremis ke jaringan terorisme.

Penelitian selanjutnya oleh Zych dan Nasaescu (2022) melakukan tinjauan sistematis terhadap faktor risiko dan protektif dalam keluarga yang berkontribusi terhadap proses radikalasi individu. Studi ini menunjukkan bahwa faktor seperti sosialisasi etnis oleh orang tua, keberadaan anggota keluarga dengan pandangan ekstremis, serta konflik dalam keluarga berhubungan erat dengan peningkatan risiko radikalasi. Sebaliknya, status sosial ekonomi keluarga yang tinggi, ukuran keluarga yang lebih besar, serta komitmen keluarga yang kuat ditemukan sebagai faktor protektif yang dapat mengurangi risiko radikalasi. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat hubungan yang jelas antara faktor keluarga dan radikalasi, bukti empiris yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan

lebih banyak penelitian longitudinal untuk memahami mekanisme sebab-akibatnya secara lebih mendalam.

Dalam konteks kajian ini, penting dibedakan peran aktor negara (*state*) dan non-negara (*non-state*) dalam dinamika isu global. Aktor negara, seperti pemerintah dan lembaga resmi, memiliki otoritas hukum dan kapasitas diplomatik untuk menyusun kebijakan, membuat perjanjian, serta mengambil keputusan formal di tingkat internasional. Sementara itu, aktor non-negara mencakup Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan multinasional, organisasi internasional non-pemerintah, hingga individu berpengaruh yang bergerak dalam isu-isu transnasional seperti Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, dan bantuan kemanusiaan. Perbedaan utama keduanya terletak pada legitimasi formal dan ruang gerak: aktor negara bekerja dalam kerangka hukum dan kedaulatan, sedangkan aktor non-negara lebih fleksibel dan sering berperan sebagai pengawas, pelopor perubahan, atau pelengkap peran negara dalam menyelesaikan masalah global.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa aktor negara dan non-negara memiliki masing-masing peran yang sangat penting dalam upaya deradikalisasi di Indonesia. Keterlibatan mereka dalam pendidikan, kolaborasi dengan pemerintah, dan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas program deradikalisasi. Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran aktor non-negara dalam deradikalisasi, masih terdapat celah dalam kajian yang secara spesifik

menyoroti bagaimana integrasi organisasi non-pemerintah internasional dapat meningkatkan efektivitas program deradikalisasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi strategi optimal dalam melibatkan *International Non-Governmental Organization (INGO)* sebagai bagian dari solusi model deradikalisasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 *Cosmopolitanism* dalam Konteks Deradikalisasi oleh Aktor Non-Negara

Konsep *cosmopolitanism* memiliki akar filosofis yang kuat dalam pemikiran moral dan politik global. Menurut Immanuel Kant (1795), semua manusia dipandang sebagai warga dunia (*citizens of the world*) yang dibebani tanggung jawab moral untuk hidup dalam tatanan damai. Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir kontemporer seperti David Held (1995) dan Thomas Pogge (2005) dengan penekanan bahwa kedudukan moral yang sama dimiliki oleh kemanusiaan tanpa memandang batasan negara, ras, maupun agama. Kewajiban universal untuk melindungi sesama manusia diyakini tidak boleh terhalang oleh sekat-sekat kedaulatan teritorial.

Dalam hubungan internasional modern, *cosmopolitanism* dipahami sebagai kerangka etis dan politik di mana individu ditempatkan sebagai pusat perhatian utama dibandingkan negara (Fine, 2007). Prinsip dasar ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban universal terhadap kemanusiaan dimiliki oleh setiap individu, sehingga keamanan manusia (*human security*)

dijadikan orientasi utama dalam kebijakan global. Arah deradikalisasi yang tidak hanya menekankan aspek keamanan fisik, tetapi juga upaya reintegrasi sosial dan pendidikan perdamaian, dipandang sejalan dengan perspektif ini. Pembangunan kapasitas masyarakat pun diposisikan sebagai manifestasi dari kepedulian terhadap martabat manusia secara menyeluruh.

Kosmopolitanisme juga menjelaskan mengapa aktor internasional bersedia terlibat dalam persoalan yang secara administratif merupakan yurisdiksi domestik negara lain. Kosmopolitanisme menawarkan sudut pandang alternatif di mana solidaritas lintas negara dipahami sebagai tanggung jawab moral terhadap ancaman global bersama (Held & McGrew, 2007). Meski demikian, kosmopolitanisme kontemporer tidak menegaskan peran negara. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya penerjemahan nilai universal ke dalam konteks lokal. Nilai kemanusiaan tidak diterapkan secara homogen, melainkan diadaptasi melalui kolaborasi dengan aktor nasional dan lokal (Delanty, 2009). Prinsip ini menjadi krusial dalam deradikalisasi, mengingat sensitivitas konteks agama, budaya, dan sosial masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, *cosmopolitanism* digunakan untuk menjelaskan motivasi moral dan legitimasi normatif dari keterlibatan aktor non-negara internasional seperti Accept International dalam isu deradikalisasi di Indonesia. Sebagai organisasi internasional berbasis di Jepang yang bergerak dalam bidang perdamaian dan rehabilitasi sosial, Accept International beroperasi melampaui batas-batas negara dengan

mengedepankan prinsip solidaritas global, kemanusiaan universal, dan rekonsiliasi lintas budaya.

Keterlibatan Accept International dalam upaya deradikalisasi di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang *cosmopolitanism* sebagai pelaksanaan tanggung jawab moral global terhadap kemanusiaan. Kosmopolitanisme menekankan bahwa ancaman seperti terorisme dan ekstremisme bukan hanya masalah di dalam negeri, tetapi merupakan masalah global yang mengganggu stabilitas dan perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu, aktor non-negara internasional melakukan intervensi berdasarkan kepentingan institusional dan dorongan normatif untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan universal. Accept International tidak hanya melaksanakan program ini, tetapi juga bertindak sebagai pendukung moral untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan mereka yang terkena dampak radikalisisasi.

Pendekatan ini menempatkan deradikalisasi bukan semata sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral global terhadap hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Dengan demikian, *cosmopolitanism* memberikan kerangka pemikiran untuk memahami bagaimana organisasi internasional mengartikulasikan nilai-nilai kemanusiaan global dalam praktik deradikalisasi yang kontekstual di Indonesia.

Selain itu, *cosmopolitanism* menjelaskan bahwa keterlibatan ini tidak dominan atau dominan; sebaliknya, itu didasarkan pada prinsip kolaborasi

dan adaptasi lokal. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, Accept International menerjemahkan nilai global ke dalam konteks budaya, sosial, dan keagamaan orang Indonesia. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam deradikalisasi oleh organisasi internasional adalah contoh nyata dari persahabatan lintas batas yang diwujudkan melalui kerja sama dengan aktor lokal. Oleh karena itu, dari sudut pandang *cosmopolitanism*, partisipasi Accept International dapat dilihat sebagai kombinasi dari motivasi moral global dan strategi lokal yang adaptif untuk menghadapi tantangan ekstremisme.

Pemikiran ini juga menjelaskan peran Accept International dalam membangun empati lintas batas, memperkuat dialog antarbudaya, serta menciptakan jembatan antara mantan ekstremis dan masyarakat lokal melalui pendekatan berbasis kepercayaan dan kemanusiaan. *Cosmopolitanism* dengan demikian memberikan dasar moral bagi upaya deradikalisasi yang tidak semata-mata diletakkan sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional, melainkan diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral global terhadap hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, kolaborasi lintas negara ditegaskan sebagai kewajiban kolektif umat manusia dalam menanggulangi ekstremisme demi perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, teori *cosmopolitanism* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran serta strategi Accept International dalam program deradikalisasi di Indonesia. Perspektif *cosmopolitanism* digunakan untuk memahami bagaimana keterlibatan aktor internasional

mencerminkan tanggung jawab global dalam menangani isu radikalisme yang berdampak lintas batas.

1.6.2 *Multi-Level Governance (MLG)* dalam Analisis Koordinasi dan Implementasi Deradikalisasi

Teori Multi-Level Governance (MLG) digunakan untuk menjelaskan distribusi otoritas yang tidak lagi terpusat pada negara, tetapi tersebar pada berbagai tingkat aktor. Marks (1993) serta Hooghe dan Marks (2001) menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan berlangsung melalui interaksi antara aktor supranasional, nasional, dan lokal. Pola ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh hubungan antar aktor yang terlibat. Dalam perkembangan selanjutnya, Hooghe dan Marks (2003) menekankan bahwa struktur tata kelola ini bersifat dinamis dan tidak hierarkis secara kaku. Perspektif ini memungkinkan analisis terhadap koordinasi lintas level dalam isu kompleks seperti deradikalisasi. Kerangka ini digunakan untuk membaca posisi *Accept International* sebagai bagian dari jaringan tata kelola yang lebih luas.

Tipologi tata kelola MLG diklasifikasikan ke dalam dua model utama, yaitu *Type I* dan *Type II*, yang masing-masing memiliki karakteristik fungsional berbeda (Hooghe & Marks, 2003). *Type I* dipahami sebagai bentuk yurisdiksi umum yang memiliki batasan wilayah yang tegas, bersifat permanen, dan tidak saling tumpang tindih, sebagaimana direpresentasikan oleh otoritas formal pemerintah pusat serta daerah. Sebaliknya, *Type II* diletakkan sebagai yurisdiksi khusus yang bersifat jauh lebih fleksibel,

memiliki tugas yang sangat spesifik (*task-specific*), dan sering kali memiliki batas wilayah yang saling tumpang tindih sesuai dengan kebutuhan fungsional. Dalam konteks penelitian ini, Dalam penelitian ini, Accept International diposisikan sebagai aktor *Type II* yang berfokus pada aspek teknis deradikalisasi. Posisi ini memungkinkan organisasi masuk ke ruang operasional yang tidak dijangkau birokrasi negara yang bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas menjadi keunggulan utama aktor non-negara dalam tata kelola multilevel.

Relasi antara *Type I* dan *Type II* menunjukkan pola saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan. Negara menyediakan legitimasi hukum dan kerangka regulasi, sementara aktor non-negara menjalankan fungsi operasional yang lebih spesifik (Bache & Flinders, 2004). Accept International mengisi celah pada aspek rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh negara. Interaksi ini menunjukkan bahwa efektivitas deradikalisasi bergantung pada pembagian peran antar aktor. Pola ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktor internasional tidak menggantikan negara, tetapi memperkuat kapasitasnya. Dengan demikian, tata kelola multilevel menciptakan hubungan yang bersifat komplementer, bukan substitutif.

Struktur vertikal dalam MLG tetap menunjukkan dominasi negara sebagai pemegang otoritas utama. Piattoni (2010) menjelaskan bahwa meskipun otoritas tersebar, negara tetap mempertahankan kontrol terhadap arah kebijakan. Dalam kasus ini, BNPT dan Ditjenpas berfungsi sebagai

regulator yang menentukan batas operasional program deradikalisasi. Accept International bergerak dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh negara dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan secara mandiri. Hubungan ini menunjukkan pola *asymmetrical governance*, di mana distribusi kekuasaan tidak seimbang antar aktor. Hal ini menegaskan bahwa fleksibilitas aktor non-negara tetap berada dalam batas kedaulatan negara.

Selain relasi vertikal, MLG juga menekankan interaksi horizontal antar aktor yang berada pada level yang sama. Enderlein et al. (2010) menjelaskan bahwa koordinasi horizontal terbentuk melalui negosiasi dan pertukaran sumber daya antar aktor. Accept International bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal dalam implementasi program. Konsep *resource exchange* menjelaskan integrasi antara keahlian global yang dimiliki aktor internasional dan pengetahuan lokal yang dimiliki mitra domestik. Pola ini memungkinkan program berjalan lebih adaptif terhadap kondisi sosial di lapangan. Interaksi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat satu arah, tetapi hasil dari koordinasi lintas aktor.

Kombinasi relasi vertikal dan horizontal menghasilkan struktur tata kelola yang kompleks. Hubungan horizontal bersifat *collaborative* karena melibatkan koordinasi dan pertukaran sumber daya secara relatif setara. Sebaliknya, hubungan vertikal bersifat *asymmetrical* karena terdapat perbedaan otoritas antara negara dan aktor non-negara (Piattoni, 2010). Accept International berada dalam posisi yang bergantung pada kebijakan

negara, meskipun memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan teknis. Struktur ini menunjukkan karakter utama *multi-level governance* dalam isu deradikalisasi yang melibatkan banyak aktor. Dengan demikian, strategi Accept tidak dapat dipahami sebagai tindakan terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem tata kelola multilevel yang terintegrasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Kerja sama internasional

Kerja sama internasional adalah suatu bentuk hubungan antara aktor-aktor global yang ditandai oleh adanya penyesuaian kebijakan untuk mencapai tujuan bersama atau manfaat kolektif (Keohane & Nye, 1977). Dalam penelitian ini, kerja sama internasional merujuk pada hubungan antara Accept International dengan aktor nasional dan lokal yang ditandai oleh koordinasi, pembagian peran, serta pertukaran sumber daya dalam pelaksanaan deradikalisasi. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana pola interaksi tersebut membentuk mekanisme implementasi program di berbagai level aktor.

1.7.1.2 Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah proses yang bertujuan untuk mengubah pandangan ekstremis individu atau kelompok menjadi lebih moderat dan menerima norma sosial yang berlaku (Rabasa et al., 2010). Dalam

penelitian ini, deradikalisasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan ideologis, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial, pemulihan relasi dengan masyarakat, serta kemandirian ekonomi individu. Konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana program yang dijalankan mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

1.7.1.3 *International Non-Governmental Organization (INGO)*

INGO adalah organisasi non-pemerintah yang beroperasi secara lintas negara dan tidak berafiliasi langsung dengan struktur pemerintahan mana pun (Fowler, 2000). Dalam penelitian ini, INGO merujuk secara spesifik pada Accept International sebagai aktor yang membawa pendekatan lintas negara dalam deradikalisasi. Peran INGO dilihat dari kemampuannya dalam menyediakan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan aktor negara, terutama dalam menjangkau aspek sosial dan komunitas.

1.7.1.4 *Pemerintah lokal*

Pemerintah lokal merupakan entitas pemerintahan di tingkat sub nasional yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan publik di wilayah administratif tertentu (Hooghe & Marks, 2001). Dalam penelitian ini, pemerintah lokal mencakup institusi seperti Lapas dan Bapas yang berperan dalam implementasi teknis program deradikalisasi. Peran ini mencerminkan posisi pemerintah lokal sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di

lapangan. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik operasional.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Kerja sama Internasional

Dalam penelitian ini, kerja sama internasional dioperasionalkan sebagai kolaborasi antara Accept International dengan pemerintah Indonesia dan aktor lokal dalam implementasi program deradikalisasi. Indikator kerja sama internasional mencakup edukasi dan bentuk kegiatan kolaboratif yang dijalankan bersama mencakup pelatihan keterampilan, edukasi berbasis keagamaan, serta dukungan psikososial bagi mantan ekstremis, jumlah aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program, frekuensi koordinasi antar lembaga, dan dampak nyata dari hasil kerja sama terhadap peserta program rehabilitasi bagi individu yang telah terpapar ideologi radikal.

1.7.2.2 Deradikalisasi

Dalam penelitian ini, deradikalisasi dioperasionalkan sebagai implementasi program yang dijalankan oleh Accept International dengan pendekatan yang lebih humanis, kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih stabil dan mandiri. Indikator deradikalisasi dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan yang digunakan (psikososial, ekonomi, ideologis), jumlah dan jenis pelatihan yang diberikan kepada peserta, tingkat partisipasi dan

perubahan sikap peserta, dan keberhasilan reintegrasi sosial mantan ekstremis.

1.7.2.3 *International Non-Governmental Organization (INGO)*

Dalam penelitian ini, INGO dioperasionisasikan sebagai peran Accept International dalam program deradikalisasi di Indonesia. Accept International tidak hanya berperan dalam implementasi program rehabilitasi, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan berbasis riset serta pelatihan bagi tenaga profesional yang bekerja dalam bidang deradikalisasi. Dengan jaringan globalnya, Accept International juga berkontribusi dalam berbagi praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain untuk meningkatkan efektivitas program di Indonesia. Indikator untuk melihat peran INGO antara lain keterlibatan INGO dalam perencanaan dan pelaksanaan program, peran dalam transfer pengetahuan dan praktik internasional, jumlah sumber daya dan pelatihan yang disediakan, dan hubungan dan kerja sama dengan aktor lokal dan nasional.

1.7.2.4 *Pemerintah lokal*

Dalam penelitian ini, pemerintah lokal dioperasionisasikan sebagai pihak yang mendukung keberlanjutan program deradikalisasi yang dijalankan oleh Accept International. Pemerintah daerah membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk reintegrasi sosial mantan ekstremis melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa kebijakan deradikalisasi selaras dengan strategi nasional serta dapat diterapkan secara efektif dengan memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Indikator peran pemerintah lokal mencakup dukungan kebijakan dan logistik terhadap pelaksanaan program, tingkat koordinasi dengan INGO dan pemerintah pusat, ketersediaan fasilitas untuk pelatihan dan reintegrasi, serta partisipasi dalam *monitoring* dan evaluasi program deradikalisasi.

1.8 Argumen Penelitian

Strategi Accept International dalam deradikalisasi di Indonesia tidak sekadar beroperasi melalui kolaborasi lintas aktor, tetapi menunjukkan posisi sebagai aktor *Type II* dalam kerangka MLG yang mengisi ruang teknis dan sosial yang tidak dijangkau oleh negara. Peran ini terlihat dari keterlibatan Accept dalam aspek rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pendekatan berbasis komunitas yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh aktor negara seperti BNPT dan aparat keamanan. Dalam struktur ini, negara tetap memegang otoritas utama sebagai regulator, sementara Accept International bergerak secara fleksibel dalam pelaksanaan teknis melalui kerja sama dengan aktor nasional dan lokal. Pola tersebut menunjukkan bahwa efektivitas deradikalisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan aktor yang memiliki fungsi berbeda dalam satu sistem kerja.

Selain itu, keterlibatan Accept International mencerminkan dorongan normatif yang dapat dijelaskan melalui perspektif *cosmopolitanism*, di mana intervensi lintas negara didasarkan pada tanggung jawab terhadap isu global seperti ekstremisme. Nilai kemanusiaan yang dibawa tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam praktik yang berfokus pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada orientasi kemanusiaan yang melampaui batas negara. Dengan demikian, strategi Accept International dapat dipahami sebagai kombinasi antara fleksibilitas operasional dalam struktur MLG dan orientasi normatif yang berasal dari nilai kemanusiaan global.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berargumen bahwa efektivitas strategi Accept International terletak pada kemampuannya mengisi celah antara pendekatan keamanan negara dan kebutuhan intervensi sosial di tingkat komunitas. Posisi ini memungkinkan Accept International berperan sebagai penghubung antara kebijakan formal dan realitas sosial yang dihadapi individu yang terpapar radikalisme. Dengan menempatkan Accept International sebagai bagian dari jaringan tata kelola lintas aktor, penelitian ini tidak melihat keberhasilan deradikalisasi sebagai hasil dari satu aktor, tetapi sebagai hasil dari interaksi yang terstruktur antara berbagai level. Argumen ini sekaligus menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktor yang memiliki fleksibilitas seperti Accept International, upaya deradikalisasi

cenderung terbatas pada pendekatan struktural yang tidak menyentuh dimensi sosial secara menyeluruh.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi dan dinamika yang dijalankan oleh Accept International dalam program deradikalisasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan holistik, dengan fokus pada makna, pengalaman, serta interaksi sosial. Pendekatan ini memberikan gambaran yang terperinci tentang praktik deradikalisasi yang dilakukan oleh Accept International, termasuk kerja sama dengan aktor lokal dan pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program, observasi terhadap kegiatan lapangan, serta studi dokumen seperti laporan program, artikel, jurnal, dan regulasi terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali narasi, strategi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program deradikalisasi secara komprehensif dan kontekstual.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai strategi yang dilakukan oleh Accept International dalam pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia. Penelitian deskriptif digunakan untuk

memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada, melainkan berfokus pada penggambaran kondisi aktual berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Melalui upaya pendekatan ini, disajikan deskripsi mendalam mengenai bentuk kerja sama, pendekatan yang digunakan, serta peran aktor-aktor yang terlibat dalam program deradikalisasi, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik deradikalisasi oleh aktor non-negara secara kontekstual dan objektif.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini berada di Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan program deradikalisasi oleh Accept International bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan komunitas lokal. Lokasi dipilih berdasarkan relevansi keterlibatan Accept International dalam kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi mantan pelaku ekstremisme kekerasan yang tersebar di beberapa daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap radikalisme. Pemilihan situs ini juga mempertimbangkan aksesibilitas data, keberadaan informan kunci, serta intensitas interaksi antara aktor internasional dan lokal dalam program deradikalisasi. Dengan mengambil lokasi di Indonesia, penelitian ini dapat secara langsung menggali praktik kolaboratif yang dilakukan di tingkat nasional maupun lokal, serta

menyesuainya dengan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat yang menjadi bagian penting dari keberhasilan strategi deradikalisasi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup berbagai aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program deradikalisasi oleh Accept International di Indonesia, yaitu pihak Accept International itu sendiri sebagai pelaksana utama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Ditjenpas yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia sebagai aktor penghubung (*intermediary actor*) yang menjembatani visi dan misi Accept International dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di tingkat nasional dan lokal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan komunitas lokal sebagai mitra pemerintah, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) seperti Nahdlatul Ulama juga Muhammadiyah yang turut berperan dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Subjek-subjek ini dipilih karena memiliki keterlibatan strategis dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan deradikalisasi baik melalui pendekatan psikososial, keagamaan, maupun ekonomi. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk dianalisis guna melihat sejauh mana sinergi antara aktor negara dan non-negara dapat

membentuk strategi deradikalisasi yang inklusif dan efektif dalam konteks sosial budaya Indonesia.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa informasi non-numerik seperti teks, transkrip wawancara, narasi, serta kata-kata yang menggambarkan pengalaman, pandangan, dan strategi dari para aktor yang terlibat dalam program deradikalisasi. Data kualitatif ini dikumpulkan melalui wawancara dengan perwakilan Accept International, serta pihak-pihak terkait dan melalui dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan, artikel, kebijakan, dan bahan presentasi yang relevan. Data jenis ini diharapkan dapat menggali makna di balik tindakan, memahami konteks sosial dari strategi yang diterapkan, serta menginterpretasikan dinamika hubungan antaraktor dalam pelaksanaan program deradikalisasi secara mendalam dan komprehensif.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan secara saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam program Accept International, sehingga informasi yang diperoleh tidak bersifat umum tetapi berbasis pengalaman dan praktik di lapangan. Pemilihan informan didasarkan pada posisi dan keterlibatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi, seperti pihak yang pernah bekerja di Accept International serta pihak yang terlibat dalam koordinasi lintas aktor.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta penelusuran dokumen internal seperti laporan program dan bentuk kerja sama dengan Ditjenpas, Lapas, Bapas, BNPT, Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia, serta organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlibat. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu perspektif, tetapi mencerminkan dinamika interaksi antar aktor dalam pelaksanaan program.

Data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks terhadap temuan di lapangan. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, serta artikel yang relevan dengan isu deradikalisasi dan peran aktor non-negara. Data ini digunakan untuk membandingkan temuan lapangan dengan kajian yang telah ada, sehingga analisis tidak berdiri secara terpisah. Selain itu, data sekunder juga berfungsi untuk mengidentifikasi pola umum dan temuan yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memiliki dasar akademik yang kuat.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan dokumen resmi serta hasil observasi untuk memastikan konsistensi temuan. Perbedaan informasi antar sumber dianalisis sebagai bagian dari proses interpretasi, bukan dihilangkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga mempertimbangkan potensi bias, terutama

karena sebagian data berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam program. Untuk mengurangi bias tersebut, data dari informan dikonfirmasi melalui sumber lain serta dibandingkan dengan literatur yang relevan. Dengan pendekatan ini, data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari informan kunci seperti perwakilan Accept International yang terlibat dalam program deradikalisasi. Teknik ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan strategi yang mereka terapkan secara langsung. Selain itu, studi literatur digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, buku, dan dokumen kebijakan. Kedua teknik ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai praktik deradikalisasi oleh aktor non-negara di Indonesia.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan mengaitkan temuan-temuan lapangan terhadap prinsip kemanusiaan lintas batas negara sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pemikiran kosmopolitanisme serta implementasi mekanisme

kolaboratif pada teori MLG yang digunakan sebagai dasar analitis. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi diinterpretasikan secara tematik untuk memahami strategi deradikalisasi yang dijalankan oleh Accept International dalam konteks kerja sama internasional dan keterlibatan aktor non-negara. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian (kongruensi) antara praktik deradikalisasi yang dilakukan Accept International—meliputi pendekatan psikososial, ekonomi, dan keagamaan moderat—dengan konsep kerja sama dalam menjalankan program tersebut dapat dipahami melalui kerangka MLG, di mana proses deradikalisasi dijalankan melalui koordinasi dan pembagian peran lintas tingkatan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menggambarkan strategi operasional organisasi, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan program deradikalisasi Accept International tidak hanya ditentukan oleh intervensi individu, tetapi oleh efektivitas kolaborasi multilevel yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip kemanusiaan lintas batas sebagaimana dijelaskan dalam kosmopolitanisme serta mekanisme kolaboratif dalam teori MLG.

1.9.8 Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Validitas diperkuat dengan memilih informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan

program deradikalisasi, seperti perwakilan yang pernah bekerja di Accept International sebagai pelaksana utama program, didukung pernyataan dan penjelasan kerja sama dan bentuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), komunitas lokal, dan tokoh agama yang aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan ekstremis. Kehadiran aktor-aktor ini mendukung bahwa data yang dikumpulkan merepresentasikan berbagai perspektif dan dimensi pelaksanaan program, mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi dampaknya di tingkat komunitas. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menjaga integritas data dan memberikan gambaran yang akurat serta menyeluruh mengenai praktik deradikalisasi oleh aktor non-negara di Indonesia.

1.10 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka terkait peran aktor negara dan non-negara dalam deradikalisasi, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu *cosmopolitanism*, dan teori yang digunakan untuk menganalisis dengan memahami bagaimana tata kelola dan koordinasi dilakukan antara berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan program deradikalisasi

adalah teori MLG, serta operasionalisasi konsep yang meliputi definisi konseptual dan operasional dari kerja sama internasional, deradikalisasi, INGO, dan peran pemerintah lokal.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini berisi deskripsi umum mengenai konteks terorisme dan radikalisme di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait deradikalisasi, serta peran organisasi internasional khususnya Accept International dalam mendukung program deradikalisasi. Bab ini juga menguraikan secara ringkas pendekatan-pendekatan yang digunakan Accept International dan wilayah kerja utamanya.

Bab III Analisis

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis difokuskan pada strategi deradikalisasi Accept International, di mana proses deradikalisasi dijalankan melalui koordinasi dan pembagian peran lintas tingkatan lewat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), komunitas lokal, efektivitas pendekatan dan kolaborasi multilevel yang terkoordinasi juga berkelanjutan, serta relevansinya dengan perspektif *cosmopolitanism* dan teori MLG. Interpretasi data dilakukan secara kualitatif untuk menunjukkan kesesuaian antara praktik dan teori.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan INGO untuk memperkuat strategi deradikalisasi di Indonesia. Penutup juga merangkum temuan utama dan menekankan pentingnya kolaborasi *multilevel actors* dalam membangun pendekatan deradikalisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.